

ABSTRAK

Munculnya pendekatan konstruktif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap hubungan bilateralnya dengan Myanmar merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap penyelesaian masalah demokrasi dan krisis kemanusiaan yang menimpa Myanmar, pendekatan ini juga juga terkonstruksikan oleh adanya preseden regional dalam nilai ASEAN way yang menekankan pada prinsip non intervensi yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi kebijakan politik luar negeri Constructive Engagement dalam mendukung demokratisasi di Myanmar. Strategi ini bertolak belakang dengan kebijakan disinsentif yang diterapkan oleh negara-negara Barat terhadap Myanmar, sebab dalam penerapannya strategi ini mengedepankan upaya dialog, consensus dan penguatan kerjasama yang dapat mendorong trend positif dalam proses transisi politik Myanmar.

Kata Kunci: Kebijakan Politik Luar Negeri, Constructive Engagement, Demokratisasi, Indonesia, Myanmar

ABSTRACT

The emergence of a constructive approach conducted by Indonesian Government towards it's bilateral relations with Myanmar known as a form of Indonesia's responsibility to be involved in the settlement of democratic issues and the humanitarian crisis within Myanmar. This approach constructed by regionalism precedent of ASEAN Way Values which reaffirm the consideration of the Indonesian Government in the making process of Constructive Engagement foreign policy to promote democratization in Myanmar. This Strategy opposed disincentive policies implied by Western Countries towards Myanmar. As in it's implementation, Constructive Engagement strategy accentuates the attempts of dialogue, consensus and strengthening cooperation between countries to create social and economic development within Myanmar and bring the positive trend in the in the process of Myanmar's political transition.

Key words: Foreign Policy, Constructive Engagement,

Demokratization, Indonesia, Myanmar